ROLE OF COMMUNITY INSTITUTIONS WARD (LPMK) DEVELOPMENT IN NEW SUB IN WARD LIMBUNGAN RUMBAI PESISIR PEKANBARU CITY YEAR 2011

Jeffrey Halim Wardana

guided by:

Drs. Raja Muhammad Amin. M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstract

Role of the Urban Village Community Empowerment (LPMK) in the Village District Limbungan Baru Rumbai Pesisir set in the city of Pekanbaru Pekanbaru area Regulation No. 9 Th 2005. LPMK role in the village is planning to move Conduct, coordinate, and monitor the development in society then use institutional resources for development in the village such as the preservation of socio-cultural values, strengthening the capacity of public institutions, implementation and improvement of the local economy and the use of natural resources. However, an important role in the Village LPMK Limbungan Baru This does not look ensures the implementation of development in the village. The research was conducted to determine the role of community development in urban Limbungan Baru Pekanbaru. The main objective of this study was to identify the role of the Institute for Village Empowerment. How is the role of these institutions in mobilizing development and how these LPMK institutional function. This study belongs to the type of qualitative research using interview data collection technique is a direct communication with informants and conduct research questions and answers related to this research problem. Selected object as the object of study is LPMK Limbungan Baru as an institution that serves as a Task Bearer empowerment in the community development districts. Once identified, the results showed that the role of LPMK In Limbungan Baru village has been good, but there are several obstacles facing LPMK Limbungan Baru in development planning at the village seemed to lack awareness of some of the people in the village and also to stimulate the organization's funding.

Keywords: Empowerment, LPMK, Village of Limbungan Baru

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (empowering) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Harjanto (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Seperti hal nya di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, sejauh ini pelaksanaan LPMK sebagai mitra dari lurah didalam sistem pemerintahan kelurahan belum begitu menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi pembangunan yang baik. Masih terdapat program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan belum dilaksanakan secara prioritas, bahkan ada yang sudah dilaksanakan tetapi tidak menunjukkan kualitas yang baik. Hal ini menekankan fungsi pemberdayaan yang menjadi tanggung jawab LPMK bersama Pemerintahan kelurahan belum terlksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab LPMK itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti "Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kotamadaya Pekanbaru Tahun 2011"

METODE PENELITIAN

Subyek penelitian adalah penelitian adalah pada narasumber yang dianggap memahami dan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi Perencanaan pembangunan di Kelurahan Limbungan Baru kecamatan rumbai Pesisir kota Pekanbaaru diantaranya Kepala kelurahan, anggota LPMK dan masyarakat yang turut serta dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Limbungan Baru. Unit analisis penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi LPMK dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Limbungan Baru Kota Pekanbaru Tahun 2011

INFORMAN PENELITIAN

Informan adalah orang yang memberi informasi dan yang menjadi sumber data dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini diambil dari Aparatur pemerintahan kelurahan Limbungan Baru, seperti Lurah beserta perangkatnya, ketua dan anggota LPMK Limbungan Baru,serta Masyarakat Kelurahan Limbungan Baru. Berikut para narasumber penelitian yang akan menjadi informan Penelitian:

Tabel I. informan Penelitian

No	Narasumber Penelitian	Jabatan
1	Vemi Herliza S.STP	Lurah Limbungan Baru
2	Tapip Suhadin S.Sos	Sekretaris Kelurahan Limbungan Baru
3	Ir. Syamsirwan Kazul	Ketua LPMK Limbungan Baru
4	Armansyah	Wakil Ketua LPMK Limbungan Baru
5	Syari'ah	Bendahara LPMK Limbungan Baru
6	Kasran	Sekretaris LPMK Limbungan Baru
7	Taufik Hidayat	Koordinatior PembangunanLPMK Limbungan Baru
8	Jasrul	Kasi Pembangunan
9	Drs. Soetarsono	Ketua RW
10	Drs. Ryad Syech, MT	Ketua RT
11	Dedi Suhendar, ST	Ketua karang Taruna
12	Usman Tedi	Warga Masyarakat Kelurahan Limbungan Baru
13	Fahmi Sayuti	Warga Masyarakat Kelurahan Limbungan Baru
14	Burhan	Warga Masyarakat Kelurahan Limbungan Baru

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

a. Data yang akan digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan observasi yang telah dilakukan.

2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumen yaitu peneliti menggunakan bahan-bahan tertulis yang mendukung penelitian

b. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Interview/wawancara:

Adalah mproses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya/ pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interview guide). Disini peneliti menggunakan metode indepth interview. Informan ataupun narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Lurah, anggota LPMK dan masyarakat Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

2) Observasi:

Dalam hal ini Sutopomendefinisikan observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan empiris. Dalam penelitian deskriptif, observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi.Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dan mendalam dengan key informan dalam penelitian ini yaitu Lurah Limbungan Baru, Sekretaris Lurah, ketua Lpmk dan

anggota, dan Masyarakat Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Gambar.1. Kerangka Pikir Penelitian

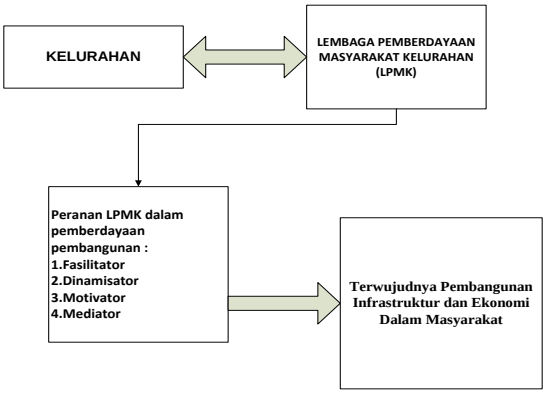

Sumber : Teori Pemberdayaan Kelurahan Suhartatik, UMY 2010

PEMBAHASAN

PERAN LPMK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/ tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut structural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004)

Untuk mengetahui seberapa besar peranan lembaga pemeberdayaan masyarakat di Kelurahan Limbungan Baru Kota Pekanbaru, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurhan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPMK adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPMK Sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan maka Peran LPMK sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana- rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan di Kelurahan Limbungan Baru dapat dialakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan/ Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan tujuan, musrenbang kelurahan antara lain :

a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
b. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
c. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan).
d. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dbiayai dari dana murni swadaya masyarakat
e. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Peran LPMK Sebagai fasilitator dikelurahan Limbungan Baru adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan (diusulkan) kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPMK selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. Peran LPMK di Kelurahan Limbungan Baru memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPMK didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang memwakili

warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahan disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kelurahan Limbungan Baru

Tabel. II. Usulan Perencanaan Pembangunan yang Di Fasilitasi Oleh LPMK Limbungan Pekanbaru

No	Agenda Usulan	Instansi/ Lembaga Yang mengusulkan	Tahun	Tujuan Usulan
1	Masalah Banjir	Forum Peduli Lingkungan RW 01 s/d Rw 04	2001	PT. CPI
2	Masalah Banjir	Forum Peduli Lingkungan RW 01 s/d Rw 04	2003	PT. CPI
3	Masalah Banjir	RW 05 dan LPM Limbungan Baru	2004	PT. CPI
4	Masalah Banjir	RW 05, Lurah dan Camat Rumbai Pesisir	2007	PT. CPI
5	Masalah Banjir	LPM Limbungan Baru	2007	PT. CPI
6	Turlap Masalah	LPM dan CPI	2009	PT. CPI
	Banjir			
7	Masalah Banjir	Forum RT/ RW	2009	PT. CPI

Sumber: Kelurahan Limbungan Baru, 2012

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan

(enabler), perantara (mediator), pendidik (educator), perencana (planer), advokasi (advocation), aktivis (activist) dan pelaksana teknis (technisi roles) (lihat Pasal 10 Permendagri RI No.7 Tahun 2007).

LPMK sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangja menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPMK Limbungan Baru mensosialisaikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat..

Kondisi geografis yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan dan rentannya bencana alam memeiliki pengaruh yang kuata dalam proses pembangunan kelurahan. Menurut Lasino (2002:1-4), berbagai pengaruh yang diakibatkan terjadinya genangan terhadap manusia, tergantung dari sifat jenis dan kondisi lingkungan yang dilanda. Pada pemukiman yang terletak didaerah pantai, tetapi arus atau gelombang lautnya tidak terlampau kuat, maka kenaikan permukaan air laut hanya akan menggenangi daerah permukiman. Tetapi didaerah yang memiliki gelombang laut yang kuat maka pengaruhnya akan lebih kompleks lagi seperti terjadinya abrasi dan sebagainya. Dengan uraian diatas, secara umum pengaruh genangan terhadap kehidupan manusia dapat dipilah menjadi 2 tahap yaitu:

1. Tahap gangguan, dimana pada tahap ini masyarakat baru merasa terganggu kenyamanannya sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa atau berkurangnya fungsi rumah sebagai tempat tinggal dan pembinaan keluarga serta berkurangnya fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

2. Tahap ancaman, dimana pada tahap ini masyarakat sudah mulai terancam keselamatannya baik pada saat terjadinya banjir akibat derasnya aliran atau longsor yang dapat merobohkan bangunan maupun pasca banjir dengan munculnya berbagai wabah penyakit serta gangguan kesehatan lainnya. Dampak yang lebih luas dari banjir adalah rusaknya lingkungan, yang akan berpengaruh terhadap banyak aspek kehidupan atau ekosistem yang ada.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa/ kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten/ kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan diri sebagai garda.

Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988 : 110).

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPMK jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas

(kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pembangunan prasarana diantaranya adalah:

1. Prinsip partisipatif.

Harus dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan ini bukanlah milik segolongan orang atau kepentingan pihak tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan bersama dan merupakan hasil keputusan bersama, yang hasilnya akan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan;

2. Prinsip warga sebagai pelaksana, orang luar sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaan kegiatan orang luar harus menyadari bahwa mereka hanya berperan sebagai fasilitator dan bukannya guru, penyuluh atau instruktur serta pelaksana kegiatan tersebut. Pengawasan adalah kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi (Purba,2005:91). Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan (Purba,2005:91). Sedangkan menurut Sujamto (1989:78), pengawasan adalah ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai yang semestinya atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah segi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pekerjaan. Dilain pihak, pengawasan juga dimaksudkan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal yang bersangkutan guna menghadapi tantangan pembangunan secara menguntungkan. Tujuan umum pengawasan adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan (Purba,2005:95). Sedangkan tujuan khusus adalah untuk:

a. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh;

b. Mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar yang diharapkan;

c. Mengkaji kesesuaian tindakan aktor yang terlibat sesuai fungsinya di semua tingkatan;

d. Mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, baik positif maupun negatif;

e. Memperoleh rekomendasi kebijaksanaan;

f. Membangun sistem monitoring yang dapat diandalkan untuk program pembangunan selanjutnya.

Hambatan yang Dihadapi LPMK dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan Limbungan Baru

Hambatan-Hambatan yang dihadapi LPMK dalam perencanaan pembangunan di kelurahan Limbungan Baru diantaranya adalah kepasifan masyarakat dalam mengemukakan gagasan pembangunan ketika diadakan kegiatan perencanaan pembangunan. Seringkali musyawarah sulit dilaksanakan karena kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam merencanakan pembangunan sehingga kesepakatan yang dicapai menjadi kesepakatan semu. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Dedi Suhendar ST.

Kemampuan lembaga masyarakat didalam melakukan fungsi fungsinya terbentur masalah koordinasi, waktu dan biaya. Seperti apa yang disampaikan oleh ketua karang taruna Kelurahan Limbungan Baru Dedi Suhendar ST. Inisiatif LPMK terkadang tidak disertakan dengan implementasi sehingga dalam penyelesaian persoalan pembangunan hasilnya kurang dirasakan. Sarana dan prasarana LPMK tidak mendukung LPMK juga tidak memiliki dana tetap sehingga terkadang inisiatif juga tidak dapat direalisasikan. Sebenarnya antusias warga terhadap musrenbang cukup baik dengan mengajukan berbagai usul saran dan masukan, namun patut disadari LPMK tidak memiliki dana tetap dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah saja sementara swadaya masayarakat sangat kecil. Persoalan pembangunan yang dihadapi dalam lingkup kelurahan atau desa merupakan pembangunan yang harus dibenahi

secara rapi seperti pemeliharaan jalan, fasilitas pemerintah, jembatan serta membangun mentalitas masyarakat nya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Mengenai peran LPMK dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Limbungan Baru Kota Pekanbaru masih kurang maksimal dalam melakukan perannya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Sedangkan hambatan yang dihadapi LPMK dalam perencanaan pembangunan di kelurahan Limbungan baru adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat yang tentu banyak dipengaruhi oleh kondisi kesejahteraan masyarakat dan peranan LPMK itu sendiri.

Perlu adanya sistem reward yang dilakukan terhadap kinerja LPMK walaupun LPMK bergerak dalam bidang sosial. Karena LPMK memberi perhatian yang besar untuk meningkatkan motivasi LPMK. Selain itu LPMK didalam melakukan fungsi pemberdayaan Juga memperhatikan efektivitas didalam memanfaatkan lingkungan supaya mampu menghasilkan output dan juga melakukan pembangunan dalam kegiatan operasional.

SARAN

Agar LPMK sebagai mitra kelurahan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik perlu terus menerus pembinaan dan bimbingan dari pemerintah serta evaluasi terhadap apa yang dilakukan.

Kemandirian LPMK sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang mampu secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan kegiatan rutin dan operasioanal diperlukan stimulant shingga menjadi titik awal LPMK bergerak menggali sumber sumber dana baik untuk operasionalnya sendiri maupun untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagai suatu organisasi, LPMK harus menyusun visi misi dan program kerja organisasi. Peningkatan manajerial dan pembinaan harus continue dilakukansehingga LPMK benar benar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Dari hasil penelitian ini diharapkan sedapat mungkin memunculkan langkah baru serta melakukan sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa

selalu dibutuhkan perannya baik dalam perencanaan maupun pembangunan. Serta adanya peningkatan kualitas peran LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta)

Arikunto, Suharsimi. 2009. Manajemen Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta)

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

Moleong, L.J., 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Politik Kualitatif, Yogyakarta: Lkis

Sutopo, HB, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press

Harjanto. Perencanaan Pengajaran. Jakarta : Rineka Cipta. 2008

Sagala, Syaiful. Managemen Strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bandung : Alpabeta. 2007

Usman, Husaini, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan; Bumi Aksara, Jakarta. 2006

Pidarta, Made. Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem. Cet. 3 ; Jakarta : Rineka Cipta. 2005

Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Suhartatik, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam perencanaan Pembangunan di kelurahan Pandan wangi tahun 2009. Malang: Skripsi UMY

Sunyoto Usman,2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang

Permendagri RI Nomor 7 Tahhun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat,

Bandung : Fokus Media.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73Tahun 2005 Mengenai Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Mengenai Pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan Tugas pokok sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru